



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

TAHUN POLITIK, WUJUDKAN KETAHANAN MASYARAKAT
Honorarium Pelayan Masyarakat Layak Ditambah

YOGYA (KR) - Honorarium jasa pelayanan yang diberikan kepada pelayan masyarakat di Kota Yogya dinilai layak untuk ditambah. Hal ini karena ketugasannya yang semakin berat dalam mewujudkan ketahanan masyarakat pada tahun politik yang tengah berjalan.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono, mengungkapkan selama tiga tahun ini honorarium pelayan masyarakat belum pernah dilakukan penyesuaian. "Besaran honorarium memang disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Saat ini kondisi keuangan daerah sudah cukup baik. Sudah selanjutnya honorarium bagi pelayan masyarakat juga disesuaikan," jelasnya.

Pemberian honorarium tersebut diatur melalui Perwal 72/2019. Pelayan masyarakat yang berhak atas honor ialah Ketua LPMK, Ketua Pengurus Kampung, Ketua RW, Ketua RT serta Ketua TP PKK dari tingkat Kemantren hingga RT. Sedangkan besaran-nya merujuk pada standar harga satuan jasa yang tiap tahun dievaluasi. Hanya sejak tahun 2020 hingga saat ini besaran honor jasa pelayanan bagi warga

Indaruwanto Eko Cahyono
Fraksi PAN



KR-Istimewa

pelayan masyarakat tidak ada perubahan.

Besaran honor bagi pelayan masyarakat berbeda sesuai jenis jabatannya. Paling tinggi ialah Ketua LPMK sebesar Rp 500.000. Disusul Ketua Pengurus Kampung Rp 350.000, Ketua RW Rp 300.000, Ketua RT Rp 250.000 dan

paling rendah Ketua TP PKK tingkat RT Rp 150.000. Honor diberikan per bulan dan dicairkan tiap tiga bulan melalui kemantren. "Selama pandemi lalu kiprah pelayan masyarakat terutama Ketua RT dan Ketua RW cukup besar. Kemudian saat ini di tengah tahun politik juga membutuhkan kiprahnya dalam menjaga ketahanan di masyarakat agar jangan sampai terpecah belah. Ini perlu apresiasi dari pemerintah," urainya.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, honor pelayan masyarakat di Kota Yogya tergolong rendah. Seperti di Magelang, honor Ketua RW sudah tembus Rp 400.000 per bulan. Bahkan di Semarang serta Surabaya honor bagi Ketua RT mencapai Rp 1 juta per bulan.

Oleh karena itu Ndaru, sapaan akrabnya, berharap penyesuaian besaran honorarium setidaknya bisa diberlakukan paling cepat pada perubahan anggaran tahun ini. Dengan begitu seiring meningkatnya intensitas politik di masyarakat, para pelayan masyarakat tetap mampu menempatkan diri dengan baik serta menjadi penengah atas setiap potensi masalah sosial.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005